

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini yang sudah berkembang teknologinya serta adanya Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 – 2025 yang membahas tentang program pemerintah yang baik, terdapat program sasaran pada perubahan birokrasi dan tuntutan perubahan sistem yang semakin meningkat seperti birokrasi yang bersifat akuntabel dan transparan. Dibutuhkannya akuntabilitas menurut Mustofa (2012: 02), yaitu sebagai tujuan dari sektor publik. Saputri (2020) menuliskan bahwa perbaikan transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan dalam membangun ekonomi publik yang lebih baik karena pada akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan utamanya pada bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, fungsi akuntansi sebagai rekap keuangan semakin dibutuhkan. Hal tersebut bukan hanya digunakan oleh pihak manajemen suatu instansi, tetapi sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab bagi pihak yang memang memerlukan. Adanya bentuk pertanggungjawaban tersebut, menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi bagian yang penting.

Menurut Halim (2007), akuntansi pemerintah memiliki arti yaitu kegiatan jasa untuk menyediakan informasi kuantitatif bersifat keuangan pada suatu entitas atau

instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi yang sesuai dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas pilihan yang memungkinkan dari tindakan yang diputuskan. Tentunya jika semakin besar dalam mengelola dana, akan semakin besar pula permintaan pertanggungjawaban keuangan sebagai wujud dari bentuk keterbukaan terkait keuangan pemerintah.

Sejak berlakunya PP Nomor 71 Tahun 2010, pada setiap pengelola keuangan daerah berkewajiban melaporkan laporan keuangan sebagai wujud dari tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan CaLK. Akuntansi pemerintah memiliki ruang lingkup yang dibagi menjadi dua yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mendefinisikan bahwa:

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan. SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Salah satu komponen laporan keuangan pada akuntansi pemerintah yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menampilkan sumber dan alokasi pemakaian keuangan dimana dananya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Didalamnya terdapat pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Seperti yang tertera pada PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam membuat suatu anggaran selalu ada unsur taksiran atau asumsi dimana kadang kala taksiran tersebut berbeda dengan yang terealisasi dalam pelaksanaan anggaran. Apalagi dengan adanya kasus Covid -19 di dunia yang mulai masuk ke Indonesia pada awal 2 Maret 2020. Saat itu, 2 Maret 2020, ada laporan temuan 2 kasus di Indonesia (Tirto.id, 2021). Merebaknya Virus Covid-19 di dunia membawa dampak pada bidang kesehatan, ekonomi, transportasi, wisata, dan bidang lainnya di berbagai industri dan wilayah. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan (Republika, 2020).

Untuk mengantisipasi dan membatasi penyebaran yang lebih luas, Pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah, menjaga jarak, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Rahayu & Muharam, 2021). Menurut Ari (2021) menuliskan bahwa mobilitas penduduk menurun akibat kebijakan karantina yang menyebabkan daya beli melemah dan ekonomi stagnan. Di tingkat makro, Pandemi Covid-19 menyebabkan resesi global dan ekonomi dalam kondisi lemah.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan dalam rangka upaya penanganan dan antisipasi dampak Pandemi Covid-19, pemerintah sudah mengambil tiga langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. Pertama adalah *refocusing* anggaran K/L dan pemerintah daerah (Pemda). Kedua, realokasi cadangan belanja

untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19. Ketiga, pengiritan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja (Kemenkeu, 2020). Disebabkan tahun 2021 kasus Covid-19 masih berlanjut, menkeu kembali melakukan *refocusing* anggaran. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah akan melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp26,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi (Kemenkeu, 2021).

Dengan adanya penyusunan laporan realisasi anggaran, dapat memperlihatkan sudah sejauh mana pencapaian target yang memang sebelumnya telah disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif telah sesuai seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan baik itu pada masa normal maupun pada masa Pandemi yang terdapat *refocusing* anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai dari mana saja sumber pendapatan, bagaimana alokasi anggarannya dan bagaimana sumber daya ekonomi digunakan. Apalagi pada masa Pandemi bisa saja terjadi perubahan yang signifikan pada unsur atau pos-pos LRA terutama bagian pendapatan dan belanjanya dengan sebelum tahun adanya Pandemi yaitu tahun 2019. Selain itu, LRA dibuat untuk menyajikan rincian catatan keuangan secara menyeluruh, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan sebagai ladang informasi apakah perolehan pendapatan dan realisasi sumber daya ekonomi telah dijalankan secara efektif, efisien dan hemat.

Mengingat pentingnya akuntansi pemerintah dan penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan yang salah satunya adalah dalam bentuk LRA dan adanya *refocusing* anggaran yang dilakukan tahun 2020 dan 2021 serta munculnya dampak Pandemi pada beberapa sektor di Indonesia yang dapat

bepengaruh pada unsur atau pos-pos di LRA, penulis ingin meninjau LRA pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Dinas tersebut merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LRA pada objek peninjauan apakah ada perubahan dan perbedaan yang signifikan dari LRA tahun anggaran 2019-2021. Kemudian bagaimana perbandingan LRA Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019-2021. Oleh karena itu, penulis berkeinginan meninjau LRA pada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai topik karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2019-2021.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja perubahan yang terjadi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019-2021
2. Bagaimana perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019-2021

3. Apakah terjadi perbedaan signifikan pada pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019-2021

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun KTTA yaitu;

1. Mengetahui ada atau tidaknya perubahan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019-2021.
2. Mengetahui perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019-2021.
3. Mengetahui perbedaan pos-pos terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan KTTA, penulis berfokus pada meninjau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan membandingkan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2019-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap karya tulis tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam segi akademik yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penyajian LRA Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Selain itu,

penulis berharap karya tulis tugas akhir ini dapat membantu pengguna laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam mengalokasikan anggaran baik dalam kondisi normal maupun di masa Pandemi.

Untuk penulis sendiri, karya tulis tugas akhir ini digunakan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan praktik kerja yang sesungguhnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan gambaran umum mengenai topik yang tergambar dalam latar belakang, selain itu BAB I berisi rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menguraikan kerangka teori terkait Laporan Realisasi Anggaran yang didapat dari hasil berbagai literatur yang dibaca dan menjadi landasan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi pembahasan mengenai tinjauan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan membandingkan LRA Tahun Anggaran 2019-2021.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini, merupakan bagian penutup karya tulis tugas akhir yang berisi kesimpulan dari hasil tinjauan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019-2021.